

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kabupaten Klaten

Halaman 14 dan 15

Pembayaran PBB Baru Tercapai 38 Persen

KLATEN - Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah Kabupaten Klaten jatuh tempo pada 30 September. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Klaten memiliki tugas berat untuk mengejar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB lantaran realisasinya baru 38 persen.

"Dari awal Januari sampai akhir Juli 2018 ini realisasinya sudah mencapai 38 persen atau sekitar Rp 9 miliar. Sedangkan target baku PBB dari Pemkab tahun ini Rp 23,5 miliar, tetapi di Perubahan diubah menjadi Rp 26 miliar. Sedangkan di internal kami targetnya Rp 30 miliar," Kasubid Penetapan dan Pelayanan BPKD Klaten, Harjanto Hery Wibowo, Rabu (1/8).

Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, kata dia, realisasi dua bulan menjelang jatuh tempo biasanya sudah

mencapai 80 persen dari target baku PBB. Namun perkiraan itu melesat pada tahun ini lantaran lamanya cuti libur lebaran Hari Raya Idul Fitri. Sehingga di bulan Juli kemarin pihaknya menggenjot penagihan melalui petugas pemungutan di desa-desa.

"Kita kehilangan momentum libur lebaran yang agak lama. Maka satu bulan penuh kemarin itu realisasinya bisa

mendekati Rp 4,5 miliar. Jadi untuk Agustus dan September atau dua bulan jelang jatuh tempo nanti minimal kita bisa mengejar SPPT Rp 22 miliar sampai Rp 24 miliar," kata Harjanto.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKD Klaten, Muhamad Himawan Purnomo menambahkan, pemerintah menawarkan *reward* untuk wilayah yang tertib membayar PBB sebelum jatuh

tempo. Sistem reward ini pada tahun lalu ternyata cukup ampuh untuk mendongkrak kesadaran wajib pajak. Setiap desa yang telah lunas PBB akan mendapat reward berupa uang operasional pembinaan dari Pemkab.

"Besarnya berapa itu berbeda. Tergantung kapan membayar dan besaran PBB yang terbayar. Sudah banyak desa yang dapat reward itu," imbuhnya. **(aya/saf)**